

KEBIJAKAN PENDIRIAN AKADEMI MILITER ANTI-IMPERIALISME OLEH PRESIDEN EVO MORALES DI BOLIVIA PADA TAHUN 2016

Andito Zeth Ohoirat¹, Cantika Wulandari Yunus²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Email: kadmaerito@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang Alasan pendirian akademi Militer pada rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Evo Morales pada tahun 2016. Metode yang digunakan ialah studi pustaka, agar berguna memperoleh alasan mendasar berdasarkan literatur yang digunakan terhadap pendirian akademi Militer Anti Imperialisme. Paradigma yang digunakan dalam mengkaji tulisan ini ialah teori kepetingan nasional oleh Jack C. Plano, dan Roy Olton. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama pendirian akademi militer di tahun 2016 untuk melawan Imperialisme dari Amerika Serikat, dan alasan kedua untuk meregenerasi militer dan mempersiapkan sosialisme dalam jangka panjang, serta memastikan kesetaraan Ekonomi yang dinamis untuk kemakmuran Bolivia.

Kata Kunci: Bolivia, Amerika Serikat, Imperialisme, Evo Morales, Militer.

Abstract: This paper examines the reasons for the establishment of the Military academy in the government regime led by Evo Morales in 2016. The method used is literature study, so that it is useful to obtain basic reasons based on the literature used for the establishment of the Anti-Imperialism Military academy. The paradigm used in reviewing this paper is the theory of national interest by Jack C. Plano, and Roy Olton. The results of this study shown three reasons: The first is the establishment of a military academy in 2016 to fight Imperialism from the United States, and the second reason is to regenerate the military and prepare for socialism in the long term, and the third for ensure dynamic economic equality for the prosperity in Bolivia.

Keywords: Bolivia, United States of America, Imperialism, Evo Morales, Military.

PENDAHULUAN

Bolivia merupakan salah satu negara di kawasan Amerika Latin, yang sejak dipimpin oleh Presiden Evo Morales pada tahun 2004, menjadi salah satu negara setelah Kuba dan Venezuela –penentang dominasi negara-negara Imperialis seperti Amerika Serikat. Morales dan beberapa pemimpin berhaluan sosialis di Amerika Latin seperti mantan presiden Kuba Fidel Castro, mantan presiden Venezuela Hugo Chavez dan mantan presiden Ekuador Rafael Correa melakukan berbagai upaya untuk melawan hegemoni Amerika Serikat di Amerika Latin dengan mendirikan *Banco del Sur* (Bank Selatan), *Mercosur* (Pasar Bersama Negara-

negara Amerika Selatan), *UNASUR* (Persatuan Bangsa-bangsa Amerika Selatan), *Telesur* (Media/ Stasiun Televis Negara-negara Amerika Selatan), *ALBA* (Aliansi Bolivariana).

Terakhir Morales sebagai presiden Bolivia untuk ketiga kalinya mendirikan Akademi Militer Anti-imperialis di Bolivia pada Agustus 2016. Pada Rabu 17 Agustus 2016, Morales meresmikan Akademi Militer yang diberi nama "***Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres González***". Pendirian akademi ini merupakan langkah kongkrit untuk membuktikan bahwa ia serius dalam melawan imperialisme.

Menurutnya imperialis menggunakan militer sebagai salah satu elemen untuk mempertahankan *status quo* maka perlu juga untuk mendirikan akademi militer yang khusus untuk melawan hegemoni imperialis di dunia. Pada masa pemerintahan Juan Pereda Asbun (1978) dan digantikan oleh David Padilla Arancibia pada tahun yang sama (1978), Morales dan keluarganya pernah mengalami tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan militer. Riwayat hidup inilah yang membuat Morales menjadi anti-imperialis. Morales saat menjabat sebagai Presiden Bolivia sudah sedang memerangi imperialis yang sering menggunakan jasa militer untuk melakukan represifitas terhadap rakyat bahkan membunuh rakyat demi kepentingannya.

Pada 17 Agustus 2016 menjadi hari penting bagi Presiden Bolivia Evo Morales dan masyarakat Bolivia dengan berdirinya akademi militer anti-imperialis yang letaknya di kota Santa Cruz, Bolivia. Akademi ini bernama "***Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres González***"¹-. Presiden Evo Morales dalam pidatonya mengatakan bahwa, "*Jika hari ini imperialis mendominasi dunia melalui akademi militer, maka akademi ini akan mengajarkan pembebasan dari penindasan imperialis.*" Morales menekankan bahwa akademi militer ini akan menjadi tempat belajar bagaimana cara untuk melawan dominasi imperialisme di dunia dan membebaskan rakyat dari penindasan. Ia menyadari bahwa militer merupakan salah satu faktor yang memengaruhi imperialisme menguasai dunia.

Menurut Morales, Amerika adalah imperialis; mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat, dan mampu menjaga kepentingan imperialismenya di setiap kawasan atau pun negara-negara di dunia termasuk di Amerika Latin. Hal ini tidak terlepas dari fasilitas pendukung militer Amerika Serikat. Salah satunya akademi militer Angkatan Darat Amerika Serikat "*Western Hemisphere Institute for Security Cooperation*" di Fort Benning, Georgia, Amerika

Serikat, yang melahirkan lulusan angkatan bersenjata siap untuk mengamankan kepentingannya di berbagai belahan .

Pada sisi lain, kebijakan Amerika Serikat dalam memberantas narkoba menjadi ancaman terhadap masyarakat petani tanaman koka pada wilayah Chapare yang merupakan perkebunan koka terbesar di Bolivia. Program ini dijalankan pada masa pemerintahan Gonzales Sanchez yang melakukan kerjasama dengan *United State Agency for International Development* yang dibentuk oleh Amerika Serikat dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Bolivia, Akademi militer Amerika Serikat di era perang dingin mendidik dengan mendoktrinasi siswa angkatan bersenjata menjadi pro imperialisme, dan cenderung anti terhadap rakyat. Salah satunya, angkatan bersenjata dari Amerika Latin yang pada saat itu dikirim untuk mengenyam pendidikan militer di akademi tersebut. Terbukti, beberapa alumni yang kemudian menjadi diktator dan melakukan tindakan-tindakan militerisme yang berujung pada terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menimpa sebagian besar rakyat di negara-negara asal mereka. Misalnya pemimpin militer Argentina Jorge Rafael Videla yang memimpin militernya di akhir 1970-an yang pada saat itu menewaskan sekitar 30.000 lawan politik sayap kiri selama masa pemerintahannya.

Menteri Pertahanan Bolivia Reymi Ferreira juga dalam pidatonya mengatakan bahwa akademi ini akan memberikan doktrin anti-imperialisme kepada para peserta didik yang akan mengenyam pendidikan militer disini. Tujuan lain didirikannya akademi anti imperialis ini yaitu agar mereka mampu mengetahui cara kerja imperialisme mendominasi dunia dan cara menghadapinya. Akademi militer anti-imperialis ini akan menjadi tempat belajar bagi angkatan bersenjata Bolivia, dan juga angkatan bersenjata dari negara-negara Amerika Latin, khususnya negara-negara yang tergabung dalam blok *Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América* (ALBA).

Pada dekade 2000-an awal dinilai sebagai awal kebangkitan sosialis di Amerika Latin. Semangat Bolivarian merujuk pada Simon Bolivar, sang pejuang Kemerdekaan Bangsa-bangsa Amerika Latin pada masa kolonial Spanyol dan Portugis di Amerika Latin² –yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Semangat ini dibangkitkan kembali untuk membebaskan bangsa-bangsa Amerika Latin dari cengkraman Imperialisme Amerika Serikat yang telah mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam milik bangsa-bangsa Amerika Latin. Oleh karenanya, alasan di balik pendirian Akademi Militer Anti-Imperialis di Bolivia ini merupakan

salah satu faktor yang sekiranya penting untuk diperhatikan dalam studi-studi yang mengembangkan kajian tentang Bolivia

METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, selain itu Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan atau *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel, majalah, jurnal atau penerbitan berkala ilmiah lainnya dan dokumentasi, serta melalui situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan untuk penelitian.

Sistem Politik Bolivia

Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales menjalankan sistem politik negara kesatuan sosialis dari hukum komunitas pluralisnasional. Sistem politik kesatuan sosialis dalam penerapannya mengedepankan hak masyarakat Bolivia, pemerintahan independen, kebudayaan Bolivia, pengakuan lembaga-lembaganya dan untuk konsolidasi entitas teritorialnya, sesuai dengan konstitusi. Meskipun penerapan sistem sosialis di Bolivia mendapatkan pertentangan ideologis terutama negara Amerika Serikat, Evo Morales tetap menjalankan sistem politik sosialis lewat kebijakan-kebijakan yang dijalankannya, sebagai upaya untuk melawan praktek-praktek imperialisme yang dibangun oleh Amerika Serikat karena merugikan masyarakat Bolivia.

Model sistem pemerintahan sosialis di Bolivia menganut sistem presidensial yang terdiri dari tiga lembaga yaitu eksekutif, parlemen, dan yudisial. Tingkatan badan eksekutif terdiri dari dua bagian yaitu; di tingkat tengah dan di tingkat departemen. Ditingkat tengah; presiden, wakil presiden, dan kementrian negara. Di tingkat departemen; representasi presiden di departemen. Kekuasaan tertinggi eksekutif dipegang oleh presiden sebagai kepala negara. Badan eksekutif memiliki jangka waktu menjabat lima tahun.³ Sistem ini mengakui kebebasan. Presiden (Badan Eksekutif) terhadap badan legislatif, sehingga badan eksekutif memiliki otoritas dalam menghadapi parlemen. Sebagai badan pengawas eksekutif, parlemen Bolivia, memiliki dua bagian yaitu kamar deputi dan senator dengan jumlah keseluruhan 130 anggota untuk masa bakti lima tahun. Selain itu, untuk sistem pemilihan parlemen, 70 dipilih langsung dari setiap distrik, 7 dipilih dari distrik berpenduduk asli, dan 53 plurinomial dipilih lewat *party*

list system. *Camara de Senadores* terdiri atas 36 kursi, dengan mana anggotanya dipilih lewat sistem *party list* untuk masa bakti 5 tahun. Kemudian, badan yudikaf (Peradilan) memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan ketentuan-ketentuan hukum dalam peradilan lewat cabang pelaksanaan fungsi yudisial. Melalui mekanisme gambaran sistem politik sosialis Evo Morales di Bolivia, sistem politik sosialis Bolivia berbentuk partisipatif sesuai dengan undang-undang konstitusi Politik Negara Bagian 7 Februari 2009, yang melibatkan ketiga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudiatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, untuk mencapai kepentingan nasional di masa pemerintahannya. Evo Morales menerapkan ideologi sosialisme kiri sebagai kekuatan sistem politik untuk melawan imperialisme Amerika Serikat yang telah memengaruhi perekonomian di Bolivia melalui kebijakan hidrokarbon.

Sosialisme-kiri di Bolivia merupakan gerakan sosial dari bawah yang mendukung Evo Morales hingga membawanya ke puncak pimpinan sebagai presiden di tahun 2006. Gerakan ini menjadi spirit pembaharuan di awal tahun 2000. Melalui partai yang berideologi sosialis, mereka membentuk sebuah tren politik baru. Secara garis besar, terdapat dua aliran politik utama di Amerika Latin yaitu Sosial demokratik, (seperti partai Sosial Chili, Broad Front Uruguay, dan partai pekerja Brazil), dan juga partai yang bercorak populis. Kelompok politik populis cenderung identik dengan gaya kepemimpinan Hugo Chavez di Venezuela. Sementara itu, Presiden Evo Morales meneruskan jejak Chaves (Populis), yang mana kebijakan-kebijakannya berpihak kepada kepentingan rakyat, dan juga cenderung anti-imperialisme. Pemerintahan sosialisme kiri yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum ini memiliki alasan dan tujuan yang utama di antaranya :

1. Perlawanan terhadap kebijakan neoliberalisme terutama eksploitasi ekonomi terhadap negara-negara miskin di kawasan Amerika Latin sebagai dampak secara langsung dari kebijakan tersebut.
2. Adanya upaya untuk membentuk sebuah aliansi reformasi sosial lewat mayoritas gerakan dan kepemimpinan sosialisme kiri di Amerika Latin yang diikuti dengan perjuangan terhadap hak-hak masyarakat adat.
3. Terpilihnya Evo Morales merupakan bagian dari alasan untuk sama-sama melawan imperialisme yang semakin kuat di kawasan Amerika Latin terutama di Bolivia.

Evo Morales mencalonkan diri sebagai presiden dari partai MAS (*Movimiento al Socialismo*), yaitu partai di Bolivia yang berhaluan sosialisme kiri. Dalam kepemimpinannya, Evo Morales perlahan mulai membangun sistem kebijakan politik luar negeri Bolivia sebagai

antithesis, dari pemerintahan sebelumnya yang cenderung bergantung kepada Amerika Serikat. Politik sosialisme kiri versi Evo Morales tidak lepas dari latar belakangnya yang sebelumnya telah menganut paham sosialisme kiri. Hal ini juga dipengaruhi oleh perpolitikan sebagian negara-negara di kawasan Amerika Latin yang sedang membangun kekuatan yang berhaluan sosialisme.

Proses Pengambilan Kebijakan Di Bolivia

Terkait dengan sistem pemerintahan sosialisme di Bolivia era Evo Morales, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui tahap- tahap demokrasi yang terbagi sesuai dengan ketentuan masing-masing lembaga pembuat keputusan seperti badan legislatif dan eksekutif. Badan legislatif memiliki tugas dan fungsi yang di atur dalam konstitusi politik negara 2009 bagian ke dua bab satu tentang komposisi dan kekuasaan majelis legislatif plurinasional sebagai pembuat undang-undang dan pengawas anggaran negara. Proses mekanisme pembuatan undang-undang legislatif (Parlemen) sebagai berikut :

1. Rancangan undang-undang diajukan oleh salah satu kamar parlemen Bolivia, dan akan memulai prosedur persetujuan. Kemudian RUU yang sudah dibahas dan disetujui, dikirim ke kamar deputi untuk dikirim ke komisi-komisi.
2. Hasil kedua kamar harus sama-sama menyetujui rancangan. Jika tidak, maka RUU tidak dapat di adopsi.
3. Setelah itu, legislasi yang diadopsi dikirim ke kamar peninjau untuk dibahas dan disetujui. Kemudian akan dikirim ke cabang eksekutif untuk dilaksanakan.
4. Namun, jika kamar peninjau tidak menyetujuinya, maka dikembalikan ke legislatif dan dibahas kembali dalam sidang pleno legislatif.
5. Dalam 30 hari tanpa keputusan majelis peninjau atas RUU tersebut, maka, RUU akan dipertimbangkan dalam pleno majelis legislatif.
6. RUU yang disetujui dalam pleno legislatif, akan dikirim ke cabang eksekutif untuk diberlakukan sebagai undang-undang.

Oleh sebab itu, proses mekanisme pembuatan undang-undang menjadi tanggung jawab bersama badan legislatif dan eksekutif. Namun keputusan terakhir ada ditangan legislatif. Selain itu, proses pengambilan keputusan Badan eksekutif diatur dalam UUD konstitusi negara pluranasional negara Bolivia 2009 pada judul II bab I bagian II pasal 172 poin I, yaitu presiden mengeluarkan keputusan tertinggi. Proses pengambilan kebijakan Evo Morales seperti sistem

pemerintahan demokrasi sebelumnya yang di mulai pada tahun 1982, di mana peran badan legislatif tetap dijalankan sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja dari eksekutif, sehingga kebijakan yang dibuat oleh presiden tetap akan ditinjau oleh parlemen, sebelum diterapkan di Bolivia. Namun dalam penerapannya ada beberapa yang tidak sesuai dengan sistem yang ada. Evo Morales lebih sering mengambil keputusan sepihak sebagai seorang presiden. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh Evo Morales sebelum disahkan menjadi UUD maupun kebijakan yang akan berlaku di Bolivia.

Proses Kebijakan Akademi Militer Anti-Imperialisme Di Bolivia

Kerangka regulasi dasar hukum pendirian akademi militer anti-imperialisme dijelaskan dalam buku “*El Neuvo Rol De Las Fuerzas Armadas*” berdasarkan hukum Organik Angkatan Bersenjata Bolivia (*Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas*) UUD No.1405, tanggal 30 Desember 1992. Kedua, sesuai dengan Konstitusi Kebijakan Negara 2009 yang memperkuat kerangka peraturan dan kelembagaan. Walaupun Ada perubahan konstitusional tahun 2009, Hukum Organik Angkatan Bersenjata Bolivia tetap berlaku sepenuhnya sejak disetujui sebelum Evo Morales menjabat presiden tahun 2005. Berdasarkan landasan hukum UUD No.1450, penerapan undang-undang ini, kemudian dijalankan Evo Morales sesuai konstitusi negara 2009 melalui⁴ kerangka kebijakan pertahanan dan keamanan, mencakup tujuan dan kebijakan terkait, empat bidang substantif kebijakan: keamanan dan pertahanan, pembangunan integral, integrasi dan perdamaian, dan pertahanan sipil. Salah satu substansi dari keamanan dan pertahanan yaitu menjamin kedaulatan dan kemerdekaan, melindungi wilayah dan populasinya, mempertahankan sumber daya karakter alami strategis dalam menghadapi ancaman orang dalam dan luar. Oleh sebab itu, pendirian akademi militer anti-imperialisme oleh Evo Morales memiliki dasar hukum dan legalitas yang didukung oleh konstitusi negara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian akademi militer anti-imperialisme di Bolivia oleh Evo Morales di masa pemerintahannya menjadi salah satu caranya melawan imperialisme di Bolivia. Tulisan ini merupakan bagian penting untuk memahami alasan pendirian akademi militer di Bolivia. Bagaimanapun juga, sejarah Bolivia tidak terlepas dari perdebatan ideologi antar sosialisme dan imperialisme, saling berdialektika, dan membangun konstruksi di balik

pendirian akademi militer ini. Melalui sistem politik sosialis yang dibangun Evo Morales di awal periodenya, Evo Morales mulai membangun basis yang kuat baik melalui eksekutif dengan mengubah masa pencalonan presiden menjadi dua kali untuk memperpanjang masa kepemimpinannya, maupun legislatif dengan partai MAS yang akhirnya menghasilkan konstitusi baru, serta dari sisi militer dengan melibatkannya dalam proses pengamanan pembangunan ekonomi negara yang memperkuat Bolivia sebagai negara sosialis yang pluranasional. Praktik-praktik imperialis memang mendominasi masyarakat Bolivia, khususnya dalam sektor ekonomi dan menyebabkan masyarakat mengalami ketertekanan dan juga kesulitan untuk mengembangkan kehidupan ekonomi mereka.

Di sisi lain, praktik-praktik imperialisme di Bolivia berkembang melalui peran Amerika Serikat, memanfaatkan perwira-perwira Bolivia yang bersekolah di akademi militer Amerika Serikat. Alih-alih membatasi penggunaan kokain, pihak militer Bolivia harus berhadapan dengan para petani koka (bahan baku pembuatan kokain), salah satunya kelompok yang diinisiasi Evo Morales. Situasi ini memaksa militer Bolivia membakar lahan koka milik petani koka. Di sisi lain, militer Bolivia juga berhasil melakukan kudeta politik terhadap presiden Bolivia berideologi sosialisme kiri, Juan Torres Gonzales. Melalui historis yang pernah dilewati, Evo Morales mulai membangun kembali dan mempertahankan rezim sosialis dengan langkah-langkah memperkuat militer sebagai basis pertahanan keamanan yang mendukung pembangunan sosialis di Bolivia. Penguatan militer lebih mengarah kepada doktrin militer (Menjadi Angkatan Bersenjata dekolonisasi, anti-imperialis dan anti-kapitalis. Berfungsi organik dengan tingkat efektivitas yang tinggi dalam memenuhi misinya untuk kepentingan keamanan, pertahanan, dan pembangunan dengan kemampuan militer untuk penerapan doktrin yang konsisten dengan Agenda Patriotik Negara Plurinasional) yang diharapkan doktrin ini mampu menjadikan militer yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan konstitusi sosialis di Bolivia.

Sementara itu, pengalaman Evo Morales sebagai aktivis sosialis buruh petani memaksanya untuk bergerak dan bertujuan mengubah cara pandang masyarakat tentang ketidakadilan. Kondisi ini membawanya kepada perjuangan dunia politik yang lebih besar dan berhasil menduduki jabatan sebagai Presiden Bolivia. Kesempatan ini digunakannya untuk mengembalikan ideologi sosialisme sebagai cara untuk menjalankan pemerintahannya. Meskipun demikian, Evo Morales harus berhadapan juga dengan komunitas imperialis yang sudah mapan di masa itu, sehingga kebijakan-kebijakannya mengalami penolakan. Kebijakan-

kebijakan kontroversinya seperti mengakuisisi perusahaan hidrokarbon milik asing dan pelegalan *koka* mendapatkan pertentangan dari banyak pihak.

Salah satunya, kebijakan pelegalan tanaman koka menjadi bagian dalam upaya untuk memelihara identitas masyarakat asli Bolivia yang tidak hanya menjadikan tanaman koka sebagai entitas adat masyarakat suku Indian, namun juga sebagai bahan pokok untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat setempat untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari dalam hal mencukupi kehidupan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk mencapai kebijakan tersebut Evo Morales sempat mengusir lembaga *Drug Enforcement Administration* (DEA) yang bekerja dalam pembasmian koka dibawah oleh USAID pada tahun 2013 dengan percobaan kudeta terhadap Evo Morales. Tanaman koka diharapkan mampu dijadikan sebagai komoditi unggulan dari Bolivia untuk melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara lain, bukan hanya sumber daya alam yang menjadi faktor komoditi unggulan untuk melakukan hubungan kerjasama antar negara

Terpilihnya Evo Morales sebagai presiden Bolivia, merupakan kunci dari revolusi perubahan sosial sebagai bagian dari perlawanan terhadap imperialisme awal tahun 2000 di kawasan Amerika Latin. Perubahan dinamika perpolitikan menjadi faktor penting bagi masyarakat Bolivia terhadap antithesis kebijakan-kebijakan dari kepentingan golongan kelas pemilik modal. Kebijakan-kebijakan sebelumnya telah merugikan sebagian besar masyarakat petani *koka* dan masyarakat adat di Bolivia. Mereka mendukung Evo Morales sebagai jalan untuk membuka harapan baru terhadap krisis kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Pada praktiknya, Evo Morales mulai memperkuat militer dengan memperkuat doktrin dasarnya kemiliteran, melibatkan militer dalam pembangunan di Bolivia seperti pengelolaan beberapa perusahaan negara dibawah pengawasan militer, serta mengakhiri hubungan kerjasama antara Bolivia dan Amerika Serikat. Hal ini ditandai dengan pengusiran duta besar Amerika Serikat untuk Bolivia. Amerika Serikat dituding sebagai aktor pendukung terhadap Gerakan kelompok separatis di wilayah timur Bolivia. Melalui duta besarnya Philip S. Gorgerg, ia di duga menjalin kerjasama antar kedua negara, namun melupakan faktor keutuhan masyarakat Bolivia. Kesatuan wilayah menjadi perhatian penting Evo Morales. Jika kerjasama ini mengganggu keutuhan wilayah negara Bolivia, tentunya akan menjadi hambatan, khususnya kepercayaan antar hubungan kedua negara. Bagi Evo Morales kepentingan nasional Bolivia merupakan segalanya

Penerapan kebijakan-kebijakan di Bolivia tentunya butuh pengawasan. Oleh karena itu, dalam mengawal sistem pemerintahan, Evo Morales membutuhkan kerjasama, khususnya dengan pihak militer. Untuk itu, ia ingin memperkuat basis militer, salah satunya dengan mendirikan akademi militer. Evo Morales mengeluarkan kebijakan ini juga sebagai kekuatan untuk melawan imperialisme oleh Amerika Serikat, dan juga untuk melindungi kepentingan nasional Bolivia. Pada dasarnya, kekuatan militer telah menjadi dasar dari pergerakan imperialisme selama ini di Bolivia, namun kekuatan ini diorganisir oleh kekuatan imperialis Amerika Serikat, sehingga pendirian akademi militer anti-imperialisme menjadi harapan dan kekuatan utama Evo Morales untuk menghalau pergerakan imperialisme, sekaligus menghasilkan militer yang menjadi tandingan militer imperialisme. Dengan berdirinya akademi militer ini, Evo Morales berharap mampu mengubah watak imperialisme dari para militer di Bolivia, menuju dan menghasilkan didikan militer yang berideologi sosialisme. Selain itu, dengan memiliki ideologi sosialisme, militer mampu melindungi kepentingan nasional Bolivia, dan mengembangkan kehidupan ekonomi sosialis hingga lebih setara. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa, akademi militer ini mempersiapkan kader-kader yang berkualitas,

Pendirian sekolah militer anti-imperialisme sebagai cara-cara “peniruan” oleh Evo Morales mengikuti bentuk-bentuk yang sudah di jalankan oleh militer sebelumnya. Selama ini, militer memiliki posisi yang strategis untuk mengatur jalan pemerintahan di Bolivia sejak digulingkannya Presiden Juan Torres Gonzales oleh Kolenel Hugo Banzer. Evo Morales memahami bahwa militerlah yang selama ini mendominasi dan memengaruhi kondisi politik dan ekonomi di Bolivia. Oleh karenanya, melalui reformasi ideologi militer dari imperialisme ke sosialisme, Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales mengharapkan militer yang berjiwa sosialis dan memastikan keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, alasan yang paling penting untuk mendirikan akademi militer ialah regenerasi militer dan mempersiapkan sosialisme jangka panjang, serta memastikan kesetaraan ekonomi yang dinamis untuk kemakmuran Bolivia

KESIMPULAN

Neridirinya akademi militer ini, Evo Morales berharap mampu mengubah watak imperialisme dari para militer di Bolivia, menuju dan menghasilkan didikan militer yang berideologi sosialisme. Selain itu, dengan memiliki ideologi sosialisme, militer mampu melindungi kepentingan nasional Bolivia, dan mengembangkan kehidupan ekonomi sosialis

hingga lebih setara. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa, akademi militer ini mempersiapkan kader-kader yang berkualitas, tidak hanya dari segi pemahaman militernya saja, namun juga dari segi akademik seperti sosiologi, geopolitik, dan juga ekonomi. Tujuannya, militer-militer hasil didikan sosialisme Bolivia mampu yang memiliki pemahaman yang luas terkhususnya tentang imperialisme, sehingga jauh dari doktrin kediktatoran sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chilcote Ronald H, *Teori Perbandingan Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Chomsky Noam, *Neo imperialisme Amerika Serikat*, Resist Book, Yogyakarta, November 2008
- Freer Jaime Baeza, Marí a Cristina Escudero Illanes, et. al. “*El Nuevo Rol de Las Fuerzas Armadas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú Red de Política de Seguridad*”, (edisi pertama), Equis Equis S.A, Peru, 2018
- Hemperi Suyatna. *Evo Morales: Presiden Bolivia Menentang Arogansi Amerika*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007.
- Levin, Judith, *Modern World Leaders: Hugo Chavez*. New York, Chelsea House Publishers, 1 Januari 2007.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Nurani Soyomukti, *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal*. Yogyakarta: Resist Book, 2007
- Ossietzky, Carl von, *The Main Actors and Their Role in the Bolivarian Revolution in Venezuela*. Oldenburg: Magisterrarbeit, 2008.
- Wahjono Padmo, dan Nazaruddin Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Politik*, (edisi terjemahan), Radja Grafindo, Jakarta, 2013
- Petraz Jamez, dan Hendri Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21, Imperialisme Abad 21*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002
- Plano Jack C, and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Western Michigan University, California, 1980
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sholehi Mohammad, *Di Ambang Keruntuhan Amerika*, Grafindo Khanzanah Ilmu Jakarta, 2007.
- Subakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992

- Wahjono Padmo, dan Nazaruddin Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Politik*, (edisi terjemahan), Radja Grafindo, Jakarta, 2013
- Hakim, Zikril, “Dampak Transformasi Gerakan Sosial Petani Koka Penduduk Asli (*Cocaleros*) Menjadi Partai Politik Terhadap Penguatan Proses Demokratisasi Di Bolivia Tahun 2005, *Skripsi*, (tidak dipublikasikan), Depok, 2010
- Mukhsin, Andi Adnan, “Kebijakan Nasionalisasi Minyak dan Gas Serta Legalisasi Koka di Bolivia Dalam Menghadapi Hegemoni Amerika Serikat Periode 2005-2009”, *Skripsi*, (tidak dipublikasikan), Jakarta, 2013
- Natariandi, Angga, “Perubahan Politik dan gerakan Sosialis di Bolivia”. *Skripsi*, (tidak dipublikasikan) FSIP Universitas Indonesia, Depok, 2009
- Ratna Haidining Tyas “Analisis Faktor Pendorong Pemerintahan Bolivia Di Bawah Otoritas Presiden Evo Morales Dalam Menghentikan Hubungan Kerjasama Dengan USAID (2013)”, *Skripsi*, (tidak dipublikasikan), Surabaya.
- Andi Teguh, “Kepentingan Kuba Dibalik Pemberian Bantuan Kesehatan Kepada Bolivia”, *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, vol 6, No 2
- Eduardo A. Gamarra, “*The Center for Preventive Action Bolivia On The Brink*”, Council On Foreign Relations, CSR NO. 24, February 2007
- Lutfi Anggara, “Fenomena Anti-Liberalisme Amerika Latin pada awal abad ke-21”, *Global*, vol. 9, no. 1, Maret-November 2007
- Rafdi, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengusiran United States Agency for International Development (USAID) di Bolivia”, *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Riau*, vol. 1, No. 2, Oktober 2014
- Robert R. Barr, *Bolivia: Another Uncompleted Revolution, Latin American Politics and Society*: Fall 2005: vol. 3, No 47; Academic Research Library